

Implementation of Revitalization Policy of Nyanggelan Market in Denpasar City Government

Putu Ariani ⁽¹⁾
Nyoman Sri Subawa ⁽²⁾

*Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Pendidikan Nasional ⁽¹⁾
Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Pendidikan Nasional ⁽²⁾*

*putuariani06@gmail.com ⁽¹⁾
srisubawa@undiknas.ac.id ⁽²⁾*

ABSTRACT

The problem in this research is how the implementation of revitalization policies Pakraman Panjer Nyanggelan Market in Denpasar government. The purpose of this study was to describe the implementation of the revitalization of Nyanggelan Market Pakraman Panjer in Denpasar government. The method used is descriptive method with qualitative approach. As for the data analysis by in-depth interview to the informant research is done by using a sampling method fluke (accidental sampling) and a sampling technique aims (purposive sampling).

The results showed: 1) The implementation process of revitalization policies Nyanggelan market in Denpasar City Government, namely: a) Nyanggelan Market revitalization plan, include: merging the Ministry of Trade RI strategic plan and work plan Disperindag Denpasar, standardize execution until the required fees; b) Implementation revitalization Nyanggelan market, include: utilization of the staff structure of the trade sector Disperindag Denpasar; utilization of resources from the Ministry of Trade, Budgets Denpasar city and village self-help. While the human resources involved are people who are experienced in the construction of public infrastructure; and the use of appropriate methods involving PT. Nirmala works for physical activity, good ingredients and quality, internal audits of the financial statements, and direct surveys were conducted by a team from the Ministry of Trade; c) Pengawasan revitalization Nyanggelan markets include: supervision is conducted 1 (one) times a week and supervision is conducted by UPTD (technical implementation unit services) Disperindag Denpasar. 2) Factors that affect the process of policy implementation revitalization Nyanggelan market in Denpasar City Government, namely : communication, resources, bureaucratic structure, disposition, environmental economic, social and political and public response. As for the obstacles that arise in the process of policy implementation Nyanggelan Market revitalization policy, such as : a) Tumbuhnya modern markets and shops networking in the area of the Village / Village Panjer makes the challenge to constantly improve itself. b) Constraints on resources is characteristic of a merchant, a heterogeneous society and the role of moneylenders still exist in the capital traders

Keywords : Public Policy; Policy Implementation; Revitalization of Traditional Markets

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah No. 112 Tahun
2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern; Peraturan Wali Kota Denpasar No.

9 tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dilakukan dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan pedagang kecil dan menengah, yang selanjutnya dilakukan penataan dan pembinaan pasar tradisional dengan program revitalisasi pasar tradisional.

Pasar Nyanggelan Desa Pakraman Panjer Denpasar Selatan merupakan salah satu pasar tradisional yang telah direvitalisasi. Sejak tahun 2011 sampai tahun 2015 beberapa pasar telah dibangun kembali fisiknya untuk meningkatkan pendapatan dan menjadi salah satu objek wisata di Kota Denpasar. Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kota Denpasar, mengatakan bahwa sebanyak 22 pasar dari 35 pasar desa yang dikelola BPM-PD Kota Denpasar direvitalisasi Pemerintah Kota Denpasar dengan dibantu pemerintah pusat melalui Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan.

Beberapa fenomena menarik yang menyebabkan kondisi Pasar Nyanggelan tidak dapat berkembang dengan baik, diantaranya kebiasaan para pedagang mengabaikan kebersihan membuat kondisi pasar menjadi kumuh yang berakibat pada rendahnya jumlah pengunjung. Transaksi di luar pasar membuat transaksi jual beli pedagang yang berada di dalam pasar

menjadi berkurang. Lahan parkir menjadi berkurang akibat para pedagang berjualan di areal parkir. Jika tidak dikelola dengan baik berimplikasi pada berkurangnya retribusi parkir.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang "Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Nyanggelan di Pemerintah Kota Denpasar".

TELAAH PUSTAKA

Kebijakan

Sebelum membahas lebih jauh mengenai kebijakan publik, perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *policy*. Menurut Friederich (dalam Winarno, 2014:20), mendefinisikan kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan yang sesungguhnya dikerjakan daripada yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan merupakan suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak sekedar mengeluarkan keputusan dalam melakukan sesuatu. Arah kebijakan pemerintah sebaiknya melakukan sesuatu yang nyata bukan sekedar melakukan apa yang diinginkan.

Kebijakan Publik

Menurut Dunn (dalam Naihasy, 2006:18), bahwa kebijakan publik adalah suatu proses ketata pemerintahan dan administrasi pemerintah yang menghasilkan keputusan pemerintah, dimana instansi yang terkait mempunyai wewenang atau kekuasaan dalam mengarahkan masyarakat dan tanggung jawab melayani kepentingan umum. Menurut Anggara (2014:33), bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat

pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Implementasi Kebijakan

Dalam kamus Webster pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “*to implement*” (mengimplementasi) berarti *to provide the means for carrying out* (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/ berakibat sesuatu). Sementara terjemahan yang lebih sederhana tentang implementasi atau dalam bahasa aslinya *to implement* adalah melaksanakan (Echols dan Shadily, 1996 : 313).

Menurut pendapat van Meter dan van Horn (dalam Winarno, 2014:149), bahwa proses implementasi sebagai “*those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set for the in prior decisions*” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat/ kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan). Selanjutnya Van Meter Van Horn (dalam Agustino, 2009:139) menyatakan, “implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan”.

Dari beberapa definisi di atas maka

dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Model-model Implementasi Kebijakan

Model-model implementasi kebijakan, ada yang bersifat abstrak, ada pula yang bersifat lebih operasional. Beberapa model implementasi kebijakan menurut Subarsono (2009:24), sebagai berikut:

1. Model Mazmanian dan Sabatier

Teori ini biasa juga disebut sebagai teori kerangka analisis implementasi. Kedua ahli ini mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel.

- a. Variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan tehnik pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
- b. Variabel intervening yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan.
- c. Variabel lingkungan, yaitu kondisi sosial, ekonomi dan dukungan publik.

2. Model van Meter dan van Horn

Model ini merupakan model yang paling klasik, diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn pada tahun 1975. Model ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah: 1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi; 2) Karakteristik dari agen pelaksana /implementor; 3) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik; 4) Kecenderungan dari pelaksana/ implementor.

3. Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Model mereka ini sering disebut oleh para ahli "*the down approach*". Menurut Hogwood dan Gunn (dalam Wahab, 2008:57-64), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu.

4. Model George C. Edward III (1980)

Model implementasi kebijakan yang yang dikembangkan oleh Edward III (dalam Agustino, 2008:149-154), menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implelementasi suatu

kebijakan, yaitu : 1) Komunikasi; 2) Sumberdaya; 3) Disposisi; dan 4) Struktur birokrasi.

Keempat variabel yang dikembangkan oleh Edward III, mempunyai keterkaitan dalam mencapai tujuan dan sasaran program/ kebijakan. Semuanya saling bersinergi dan satu variabel sangat mempengaruhi variabel yang lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan program. Model implementasi dengan empat variabel di atas dapat digunakan alat pencitraan implementasi program dalam berbagai tempat dan waktu. Artinya, empat variabel yang tersedia dalam model dapat digunakan untuk pencitraan fenomena implementasi kebijakan publik.

5. Model Grindle (1980)

Pendekatan Grindle (1980) dalam implementasi kebijakan menyatakan bahwa untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan tergantung pada *content of policy* (isi) dan *context of implementation*, serta tingkat keberhasilannya tergantung pada kondisi tiga komponen variabel sumber daya implementasi yang diperhatikan yaitu: kekuatan, kepentingan aktor yang terlibat, karakter instansi, dan tingkat kepatuhan.

Tahapan Implementasi Kebijakan

Menurut Gunn (dalam Islamy, 2009:103), bahwa tahapan dalam

implementasi kebijakan sebagai berikut :

1. Tahap I terdiri atas kegiatan-kegiatan : 1) menggabungkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan;2) menentukan standar pelaksanaan;3) menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.
2. Tahap II merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode yang tepat.
3. Tahap III, meliputi kegiatan: 1) penentuan jadwal;2) melakukan pemantauan; 3) mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.

Selanjutnya Dunn (dalam Winarno, 2014:35), bahwa tahapan implementasi kebijakan sebagai berikut :

1. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan.

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/*

policy options) yang ada.

3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

4. Tahap implementasi kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

5. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi kebijakan publik

Edward III (1980-28), menyebutkan 4 (empat) factor yang mempengaruhi implementasi:

1. *Communication transmittion, clarify and consistency* (Komunikasi), yaitu Terjadi proses komunikasi yang disampaikan dengan jelas dan konsisten.
2. *Resources: staff, information,*

authority, facilities (Sumber Daya), yaitu Terdapat sumberdaya yang didukung oleh staf, informasi, kewenangan maupun fasilitas yang memadai.

3. *Disposition: incentives, staffing* (Disposisi), yaitu terdapat pertunjukan yang jelas mengenai pemberian insentif dan dukungan staf.
4. *Bureauceratic Structure; standard operating procedures, fragmentation* (Struktur Birokrasi), yaitu terdapat sistem birokrasi yang memiliki prosedur standar kerja yang memadai.

Pendapat Hogwood dan Gunn (1978:86), dengan mendekati model “*the top down approach*”. Terjadinya interaksi antara keempat faktor tersebut di atas, dikembangkan dengan pendekatan model “*the top down approach*” dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kondisi eksternal yang di hadapi oleh badan /instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius.
2. Pelaksanaan program tersedia waktu dan sumberdaya memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan timbal balik yang kondusif.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai

- penghubungnya.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
 7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
 8. Tugas-tugas yang terperinci dan disimpulkan dalam urutan yang tepat.
 9. Komunikasi dan koordinasi yang optimal.
 10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan dapat menentukan dan mendapat keputusan yang sempurna.

Selanjutnya menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2008:23), tentang "*model policy implementation process*". Model ini memunculkan tipologi kebijakan, yaitu: jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan dan jangkauan atau lingkungan kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Konsep Revitalisasi

Pengertian revitalisasi menurut Poerwadarminta (2002:214), bahwa revitalisasi sebagai proses, cara, dan perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali. Selanjutnya Danisworo (dalam Maulana, 2007:4), bahwa revitalisasi adalah proses untuk penguatan kembali sesuatu yang sebelumnya pernah memiliki pengaruh dan peran yang signifikan, namun telah mengalami penurunan /degradasi. Revitalisasi tidak hanya berorientasi pada

perbaikan fisik, tetapi harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dalam proses revitalisasi sebuah pasar harus mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial.

Konsep Pasar Tradisional

Pasar tradisional sebagai pasar yang dikelola dengan manajemen yang lebih tradisional dan simpel daripada pasar modern. Pasar tradisional cenderung menjual barang-barang lokal dan kurang ditemui barang impor. Merujuk Peraturan Presiden Republik Indonesia No.112 Tahun 2007, definisi pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki /dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Definisi Operasional

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah serangkaian keputusan yang diambil oleh Pemerintah Kota Denpasar beserta instansi terkait, masyarakat, pengelola pasar dan para pedagang tradisional untuk bersinergi berkenaan dengan kegiatan revitalisasi pasar tradisional berdasarkan tujuan yang telah dipilih serta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan berada dalam batas kewenangan Pemerintah Kota Denpasar.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden RI No.112/2008 dan Peraturan Wali Kota Denpasar No. 9 tahun 2009 revitalisasi pasar tradisional telah yang ditetapkan pemerintah yang melibatkan sumber daya antara lain aktor birokrat sebagai pelaksana, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan yang dapat menghasilkan keluaran dan dampak yang telah direncanakan yakni adanya perubahan tertentu dalam meningkatkan daya saing pasar tradisional dan permasalahan yang ingin diatasi oleh suatu program.

3. Revitalisasi Pasar Tradisional

Revitalisasi pasar tradisional merupakan proses menggiatkan kembali pasar tradisional dengan memperhatikan

konsep RTRW Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya juga memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, areal parkir, dan fasilitas yang dapat menunjang kegiatan operasional pasar, sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik pedagang maupun pengunjung (konsumen).

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pasar Nyanggelan Desa Pakraman Panjer, Denpasar Selatan. Penulis memilih lokasi penelitian di Pasar Nyanggelan dengan pertimbangan bahwa:

1. Pasar Nyanggelan Panjer merupakan salah satu dari pasar tradisional yang telah mampu berbenah dengan program revitalisasi pasar yang dicanangkan Pemerintah Kota Denpasar.
2. Pasar Nyanggelan Panjer merupakan tempat penelitian yang cukup mudah dijangkau dari segi waktu maupun biaya sehingga memudahkan mendapatkan data berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah.

Desain Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kebijakan (*policy research*) dengan metode deskriptif

pendekatan kualitatif. Selanjutnya pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2012:86), bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, bersifat verbal, kalimat-kalimat, fenomena-fenomena, dan tidak berupa angka.

Jenis dan Sumber Data

Menurut pendapat Bungin (2013:123), bahwa data adalah bahan keterangan tentang sesuatu obyek penelitian.

Jenis Data

Data menurut jenisnya meliputi: data kuantitatif dan data kualitatif. Jenis data kuantitatif merupakan suatu data dimana seluruh informasi yang dikumpulkan dapat dinyatakan dengan angka-angka, sedangkan data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka-angka. Pada penelitian ini menggunakan data kualitatif.

Sumber Data

Sumber data sangat diperlukan dalam mengadakan penelitian untuk memperoleh sejumlah informasi dan fakta-fakta yang sesuai dengan yang digunakan untuk penulisan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut : 1)Wawancara Mendalam

(*In depth interview*), 2) Observasi 3) Studi Pustaka/ Dokumentasi

Informan Penelitian

Menurut Pasolong (2013:107), bahwa teknik sampling kebetulan (*accidental sampling*) merupakan suatu teknik penarikan sampel yang paling sederhana, karena peneliti memperoleh sampel dengan cara kebetulan di lokasi penelitian dengan tidak menggunakan perencanaan tertentu. Sedangkan teknik sampling bertujuan (*purposive sampling*) merupakan suatu teknik penarikan sampel yang digunakan dengan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik populasi.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data bertujuan untuk menghindari kemungkinan adanya data yang tidak akurat. Menurut Nasution (2003:72-74), bahwa pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dan cara. Adapun teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

kualitatif, mengikuti konsep yang dikembangkan Miles and Huberman (1992:248) yang dikutip Sugiyono (2012:246), yakni analisis data dengan komponen, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Nyanggelan di Pemerintah Kota Denpasar

Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Denpasar terkait revitalisasi Pasar Tradisional dapat terealisasi secara maksimal, maka program revitalisasi Pasar Nyanggelan dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu: tahapan perencanaan revitalisasi, tahapan pelaksanaan revitalisasi, dan tahapan pengawasan revitalisasi.

Tahapan Perencanaan Revitalisasi

Pada tahapan perencanaan revitalisasi Pasar Nyanggelan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu: 1) penggabungan rencana, 2) standarisasi pelaksanaan revitalisasi, dan 3) penentuan biaya dan waktu pelaksanaan revitalisasi. Kegiatan revitalisasi Pasar Nyanggelan merupakan penggabungan dari RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2010 s.d 2015 merupakan rencana pembangunan lima tahunan yang merupakan tujuan negara yang akan

direalisasikan oleh setiap daerah selama tahun 2010 s.d 2015, baik di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten dalam bentuk RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Renstra (Rencana Strategis) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia merupakan rencana yang akan dicapai oleh lembaga yang harus direalisasikan oleh sublembaga yang berada di bawahnya, yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten dalam bentuk Rencana Kerja.

Tahapan Pelaksanaan Revitalisasi

Selanjutnya untuk tahapan pelaksanaan revitalisasi Pasar Nyanggelan dilaksanakan pada awal Juni 2013. Peletakan batu pertama pelaksanaan revitalisasi Pasar Nyanggelan dilakukan oleh Walikota Denpasar yang didampingi oleh SKPD terkait, pejabat legislatif dan Forum Pengelola Pasar Desa (FPPD) Kota Denpasar. Pelaksanaan revitalisasi Pasar Nyanggelan Desa Pakraman Panjer dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: pendayagunaan struktur staf, pendayagunaan sumber dana, dan penerapan metode yang tepat.

Tahapan Pengawasan Revitalisasi

Untuk tahapan pengawasan revitalisasi Pasar Nyanggelan dilakukan melalui penjadwalan pengawasan dan

pelaksanaan pengawasan. Tahap Penjadwalan pengawasan yang dilakukan secara rutin dan berkala bertujuan untuk melihat dan mengetahui langsung perkembangan pelaksanaan program revitalisasi.

Faktor-faktor Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Nyanggelan di Pemerintah Kota Denpasar

Menurut Edward III yang dikutip Nugroho (2008:225), bahwa isu utama dalam kebijakan publik adalah kurangnya perhatian kepada implementasi kebijakan publik, tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilakukan dan yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi, yaitu: komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), struktur birokrasi (*bureaucratic structure*), dan disposisi (*disposition*) disamping itu karakter badan-badan pelaksana dan sikap pelaksana serta kondisi ekonomi, sosial dan politik sebagaimana disampaikan oleh van Meter dan van Horn.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena tanpa adanya komunikasi kebijakan-kebijakan tidak akan sampai pada arah kebijakan sehingga tujuan tidak dapat dicapai.

2. Sumber Daya

Setiap permasalahan yang ada terkait sumber daya manusia dan keuangan senantiasa melakukan upaya agar tidak menjadi kendala yang dapat menghambat implementasi kebijakan. Sedangkan hasil analisa bahwa sumber daya memiliki peranan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah Kota Denpasar terkait revitalisasi pasar tradisional dalam hal ini Disperindag Kota Denpasar, walaupun ada kendala namun tidak menghambat secara menyeluruh pelaksanaan kebijakan yang diprogramkan. Adanya upaya dan usaha yang dilakukan Disperindag Kota Denpasar agar kendala ini tidak menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan.

3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan struktur organisasi yang menentukan bagaimana pekerjaan dikelompokkan, dibagi, dan dikoordinasikan secara formal yang meliputi dimensi pembagian pekerjaan, garis komando, cakupan kendali, formalisasi aturan dan standar operasi prosedur.

Berdasarkan hasil observasi, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan dilingkungan Disperindag Kota Denpasar sudah memiliki prosedur standar operasi dan struktur yang jelas.

4. Sikap Implementator (Disposisi)

Sikap Emplementator (Disposisi) adalah suatu kemauan, keinginan dan kecendrungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, komitmen implementator di Disperindag Kota Denpasar dalam melaksanakan program-program revitalisasi sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan pemahaman akan kebijakan yang dilaksanakan dan pengerjaan sesuai prosedur yang ada.

5. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Hal yang juga perlu diperhatikan dalam menilai kinerja implementasi kebijakan yaitu lingkungan eksternal seperti: lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Sehingga, upaya mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan aspek kondusif kondisi lingkungan eksternal yaitu: ekonomi, sosial, dan politik.

6. Respon Masyarakat

Respon masyarakat sebagai obyek implementasi kebijakan revitalisasi pasar Nyanggelan dan sekaligus sebagai pemanfaat program perlu diperhatikan dalam menilai optimalisasi implementasi kebijakan. Respon yang positif muncul

sebagai bentuk partisipasi aktif dalam setiap kegiatan. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil respon positif yang ditunjukkan masyarakat berdampak hasil positif berupa manfaat yang dirasakan yaitu meningkatkan omzet penjualan, lancarnya distribusi barang dan tumbuhnya motivasi usaha dibidang ekonomi rakyat.

Implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Nyanggelan dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai hambatan yang muncul baik hambatan dari masyarakat maupun pihak yang terkait, yaitu:

1. Secara eksternal, yaitu tumbuhnya pasar modern dan toko berjejaringan di wilayah Desa /Kelurahan Panjer menjadikan tantangan untuk selalu berbenah diri.
2. Secara internal yaitu perilaku pedagang, tipologi masyarakat yang heterogen dan peran rentenir masih ada dalam urat nadi permodalan pedagang.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan rumusan masalah penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Proses Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Nyanggelan di Pemerintah Kota Denpasar, sebagai berikut:
 - a. Perencanaan revitalisasi Pasar

- Nyanggelan, meliputi: pengabungan antara renstra Kemendag RI dan rencana kerja Disperindag Kota Denpasar, standarisasi pelaksanaan sampai pada biaya yang dibutuhkan;
- b. Pelaksanaan revitalisasi Pasar Nyanggelan, meliputi: pendayagunaan struktur staf dari Bidang Perdagangan Disperindag Kota Denpasar; pendayagunaan sumber dana dari Kementerian Perdagangan RI, APBD Kota Denpasar dan swadaya desa. Sedangkan sumber daya manusia yang terlibat merupakan orang-orang yang berpengalaman dalam pembangunan infrastruktur publik; dan penggunaan metode yang tepat dengan melibatkan PT. Karya Nirmala untuk kegiatan fisik, bahan-bahan yang baik dan berkualitas, internal *audit* terhadap laporan keuangan, dan survei langsung yang dilakukan oleh tim dari Kementerian Perdagangan RI.
 - c. Pengawasan revitalisasi Pasar Nyanggelan meliputi: pengawasan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam seminggu dan pengawasan dilaksanakan oleh UPTD (unit pelaksana teknis dinas) Disperindag Kota Denpasar.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Nyanggelan di Pemerintah Kota

Denpasar, yaitu: komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, disposisi, lingkungan ekonomi, sosial dan politik serta respon masyarakat. Hambatan dalam proses implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Nyanggelan, seperti:

- a. Tumbuhnya pasar modern dan toko berjejaring di wilayah Desa /Kelurahan Panjer menjadikan tantangan untuk selalu berbenah diri.
- b. Kendala pada sumber daya adalah karakteristik pedagang, masyarakat yang heterogen dan peran rentenir masih ada dalam permodalan pedagang.

Saran

1. Dalam perencanaan revitalisasi pasar tradisional Kota Denpasar di Pasar Nyanggelan, perlu adanya koordinasi dan kerjasama untuk menyamakan tujuan dan sasaran atas kebijakan yang dibuat, tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi melibatkan obyek sasaran kebijakan.
2. Dalam pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional Kota Denpasar di Pasar Nyanggelan, perlu adanya sosialisasi yang lebih intens dari Pemerintah Kota Denpasar melalui Disperindag Kota Denpasar dalam implementasi kebijakan tersebut.
3. Dalam pengawasan revitalisasi pasar tradisional Kota Denpasar di Pasar Nyanggelan, sebaiknya setiap komponen

yang terlibat dalam kegiatan ini melakukan pengawasan secara berkala untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dari program revitalisasi yang telah dilakukan, sehingga dapat diketahui strategi yang tepat dalam pengawasan tersebut.

4. Adanya kebijakan terkait kerjasama antara pasar modern menggandeng pasar tradisional.
5. Tersedianya alat pemadam kebakaran dan genset di sekitar Pasar Nyanggelan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alek, I. W. N. A. (2015). *Implementasi Kebijakan dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan di Pemerintah Kota Denpasar*. Tesis, MAP Undiknas Denpasar.
- Arvita, M. (2005). Peranan Auditor Internal Dalam Menunjang Penerapan Sistem Manajemen Kualitas, *Jurnal Fakultas Ekonomi. Jurusan Akuntansi*. Universitas Islam Bandung.
- Agustino, L. (2009). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, J. E. (1979). *Public Policy-Making*. USA: Michigan University.
- Bungin, B. (2013). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Denhardt & Denhardt. (2003). The New Public Service: An Approach To Reform, *International Review of Public Administration*, 8 (1).
- Echols, J. M., dan Hasan Shadily. (1996). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton. NJ: Princeton University Press.
- Hasbiah, S. (2004). *Model Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Makassar*. *Majalah Manajemen dan Usahawan Indonesia*.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Islamy, M. I. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismael. (2010). *Manajemen Pelayanan Publik*. Malang: Ash Sshiddiqy Press.
- Meter, D.V., dan Carl Van Horn. (1979). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society* 6. London: Sage.
- Miles, M. B., dan Huberman, A. Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif*

- (*Qualitative Data Anallysis-Sage Publication, Inc*). Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Maulana, N. (2007). Studi Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Bulu Semarang, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan*.
- Moleong, L.J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Naihasy, S. (2006). *Kebijakan Publik (Public Policy) Meng-gapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Midi Pustaka.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nugroho, D. R. (2008). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elexmedia Komputindo.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. (2008). *Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*. www.bpkp.go.id.
- Peraturan Walikota Denpasar No. 9 Tahun 2009. *Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*. www.perindag.denpasarkota.go.id
- Pasolong, H. (2013). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Poerwadarminta. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pressman, J. L., dan Aaron Wildavsky. (1997). *Implementation*. Los Angeles: University of California Press.
- Suandi, I. W. (2010). *Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1 (1).
- Subarsono, AG. (2009). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Wahab, S.A. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Cet.1. Yogyakarta: CAPS (center of academic publishing service).
- Yosua, A. (2007). *Kebijakan Publik: Teori, Proses*. Bandung: Laboratorium Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Administrasi Negara LP3AN FISIP UNPAD.